

Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Papua

Diana Wijayanti^{1*}, Salsa Nova Ramadhani², Bintang SatrioWibowo³

^{1,2}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

³Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

*Corresponding author: diana.wijayanti@uui.ac.id

JEL Classification Code:

I31, I32, I38

Kata kunci:

Tingkat kemiskinan, PDRB, populasi, IPM, tingkat pengangguran

Email penulis:

21313084@students.uui.ac.id

bintangsatryo@mail.unnes.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol3.iss2.art1

Abstract

Purpose – This study aims to explain the influence of GRDP, Human Development Index (HDI), population and unemployment rate on poverty rates in Regencies/Cities in Papua Province

Methods – This study uses panel data regression analysis with a Fixed Effect model. This study uses four independent variables, namely GRDP, HDI, population and unemployment rate, while the dependent variable is the poverty rate.

Findings – The results of the study explain that population and HDI have an impact on reducing poverty rates in Regencies/Cities in Papua Province. While GRDP and unemployment rate do not affect poverty rates.

Implication – The implications of the results of this study are that they can contribute to the development of literature and provide appropriate policy recommendations for local governments in efforts to reduce poverty rates in Regencies/Cities in Papua Province.

Originality – The results of this study contribute to providing insight and identifying specific factors that influence poverty rates, especially in Regencies/Cities in Papua Province.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah populasi dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Metode – Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model *Fixed Effect*. Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yaitu PDRB, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kemiskinan.

Temuan – Hasil penelitian menjelaskan bahwa jumlah penduduk dan IPM berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Sedangkan PDRB dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan.

Implikasi – Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pemerintah daerah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Orisinalitas – Hasil penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan dan mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang serius karena secara langsung berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan pembangunan jangka panjang (Ayoo, 2022). Kemiskinan yang meluas dapat menyebabkan tingginya ketimpangan sosial, menurunnya produktivitas tenaga kerja serta peningkatan beban anggaran negara untuk program bantuan sosial. Selain itu, kemiskinan sering kali terkait dengan masalah lain, seperti rendahnya tingkat pendidikan, buruknya kesehatan masyarakat, harapan hidup yang rendah, eksklusi dan diskriminasi sosial, tingkat pengangguran yang tinggi, angka kematian bayi dan ibu yang tinggi dan kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait antara unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi yang efektif guna memerangi kemiskinan secara global. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik, tetapi lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, namun sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil (Todaro & Smith, 2020).

Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan, dan perubahan dalam distribusi pendapatan selama periode waktu tertentu di suatu negara (Bourguignon, 2000). Studi yang dilakukan di Cina pertumbuhan memainkan peran yang sangat besar dalam mencapai keajaiban pengurangan kemiskinan (Wan et al., 2021). Demikian juga dengan temuan di 10 negara bekas pasca-Soviet terpilih, yaitu *Commonwealth of Independent States* (CIS) yang menunjukkan bahwa peningkatan PDB akan menurunkan kemiskinan (Abduvaliev & Bustillo, 2020). Namun meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi kemiskinan, dampaknya bervariasi tergantung pada pola pertumbuhan, kapasitas masyarakat miskin, serta cara kemiskinan diukur. Pertumbuhan saja tidak cukup; kebijakan yang pro-masyarakat miskin dan peninjauan terhadap efek “trickle-down” diperlukan untuk memastikan manfaatnya merata (Škare & Družeta, 2016). Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi kemiskinan; dampaknya bergantung pada intensitas lapangan kerja, produktivitas sektor, dan mobilitas lintas sektor. Untuk menurunkan kemiskinan, sektor produktif perlu mendorong pertumbuhan padat karya, sementara sektor kurang produktif juga memerlukan pertumbuhan serupa. Analisis spesifik tiap negara diperlukan untuk mengatasi kendala dan memastikan masyarakat miskin dapat mengakses peluang kerja yang lebih baik (Hull, 2009). Bahkan hasil studi yang dilakukan di Vietnam, menunjukkan bahwa PDB merupakan variabel yang tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan (Nguyen et al., 2020).

Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus menggambarkan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur (Todaro, 2006). Teori populasi Malthus merumuskan bahwa pertumbuhan populasi akan selalu melebihi pertumbuhan sumber daya alam yang tersedia, sehingga kemiskinan dan kelaparan akan selalu menjadi ancaman bagi manusia. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup, peluang kerja, dan akses ke sumber daya cenderung memperburuk kemiskinan. Namun, dengan pengelolaan yang baik, penduduk besar bisa menjadi potensi ekonomi yang mendorong pengentasan kemiskinan. Studi yang dilakukan di Afrika Sub Sahara, menunjukkan pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang penting yang menentukan kemiskinan. Pertumbuhan penduduk secara signifikan menghambat kemiskinan di seluruh ekonomi Afrika dalam jangka pendek dan panjang (Zaman et al., 2023). Hal lain yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga aspek utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Studi yang dilakukan di 15 negara bagian di India menunjukkan bahwa pembangunan manusia memiliki pengaruh yang mendalam terhadap pengurangan kemiskinan (Singh, 2012).

Di Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu masalah besar yang harus dihadapi bangsa sejak dulu hingga sekarang. Berdasarkan data Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung fluktuatif dalam beberapa

tahun terakhir, namun tetap berada di kisaran 25 juta-27 juta penduduk per tahunnya. Tahun 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 26,42 juta, kemudian naik menjadi 27,54 juta pada tahun 2021. Namun di tahun 2022, jumlahnya turun menjadi 26,16 juta penduduk, yang kemudian terus turun hingga di 2024 sebesar 25,22 juta penduduk. Dilihat secara regional, wilayah di tanah air dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah wilayah Maluku dan Papua. Provinsi Papua, sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, justru menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan. Wilayah yang berada di paling timur Indonesia ini memiliki angka kemiskinan sebesar 19,39%, di mana kemiskinan di sana tersebar di wilayah perkotaan sebesar 6,16% serta wilayah perdesaan sebanyak 26,32%. Meski begitu, jumlah penduduk miskin di Papua tak sebanyak di wilayah lain. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini tercatat sebanyak 1,51 juta orang, dengan rincian di perkotaan sebanyak 160 ribu dan di perdesaan sebanyak 1,35 juta orang. Keberagaman ini menarik untuk dilakukan analisis mengenai kemiskinan di Provinsi Papua.

Mengatasi kemiskinan bukan hanya soal meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, dan memperkuat daya saing negara di tingkat global. Penelitian ini memperkenalkan perspektif baru dengan mengeksplorasi hubungan antara faktor ekonomi, sosial, dan struktural terhadap kemiskinan. Kebaruan utama terletak pada analisis multidimensi yang menunjukkan bahwa banyak individu tidak tergolong miskin secara moneter tetapi mengalami kekurangan dalam pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Selain itu, ditemukan bahwa PDRB berperan dalam mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini juga menyoroti efek kontradiktif dari dampak variabel jumlah populasi terhadap kemiskinan dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk memutus lingkaran kemiskinan di Papua.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu penggabungan antara data *time series* dengan data *cross-section*. Kelebihan dari penggunaan data panel adalah penggabungan data menyebabkan data penelitian lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang besar (Widarjono, 2013). Data *time series* dalam penelitian berupa rentang tahun yakni tahun 2017 – 2022 atau selama 6 tahun. Data *cross-section* dalam penelitian data tersebut berupa 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kemiskinan dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sedangkan variabel bebasnya memiliki empat variabel yakni PDRB, jumlah penduduk, IPM dan pengangguran di kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Satuan	Definisi
Tingkat Kemiskinan	MIS	Persen	Persentase jumlah orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	milyar rupiah	Sejumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada suatu daerah. PDRB dihitung berdasar harga konstan 2010
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	persen	Indikator capaian Pembangunan kualitas hidup masyarakat yang diukur berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak
Jumlah Penduduk	JP	Jiwa	Seluruh manusia (orang) yang bertempat tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia (RI) dengan syarat memiliki tujuan untuk menetap
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen	Persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Persamaan model penelitian adalah sebagai berikut:

$$MIS_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 JP_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- MIS_{it} = Tingkat kemiskinan
 $PDRB_{it}$ = Produk Domestik Regional Bruto
 IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia
 JP_{it} = Jumlah penduduk
 TPT_{it} = Tingkat pengangguran Terbuka
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien
 i = *Cross Section* (Kab/Kota)
 t = *Time Series* (tahun)
 ε_{it} = *error term*

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan data dari penelitian di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua selama periode penelitian 2017 hingga 2022.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. dev
Tingkat Kemiskinan (%)	2.876.851	3.047.000	4.365.000	1.003.000	9.688.131
PDRB (Miliar Rupiah)	6.610.544	1.515.350	80277.60	6.739.200	14854.22
IPM (%)	5.723.328	5.644.500	8.061.000	2.787.000	1.119.797
Jumlah Penduduk (Jiwa)	128789.8	109867.5	410852.0	13465.00	85610.41
TPT (%)	3.416.437	2.435.000	1.339.000	0.110000	3.126.697

Tabel tersebut menunjukkan jika tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mempunyai rata-rata 28,77%. Kabupaten Merauke memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 10,03% pada tahun 2020, dan Kabupaten Deiyai memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 43,65%. Variabel PDRB rata-rata adalah Rp. 6.610.544.000. Kabupaten Yalimo memiliki PDRB terendah sebesar Rp. 673.920.000 pada tahun 2017, sedangkan Kabupaten Mimika memiliki PDRB tertinggi sebesar Rp. 80.277.600.000 pada tahun 2022. Selain itu, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah 57,24%. IPM terendah tercatat di Kabupaten Nduga sebesar 27,87% pada tahun 2017, dan IPM tertinggi tercatat di Kota Jayapura sebesar 80,61% pada tahun 2022. Selanjutnya variabel Jumlah Penduduk rata-rata sebesar 128.789,8 jiwa. Kabupaten Biak Numfor memiliki jumlah penduduk terendah 13.465 jiwa pada tahun 2020, dan Kota Jayapura memiliki jumlah penduduk tertinggi 410.852 jiwa pada tahun 2022. Terakhir variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-ratanya adalah 3,42%. Kabupaten Dogiyai memiliki TPT tersendah sebesar 0,11% pada tahun 2019, dan Kabupaten Jayapura memiliki TPT tertinggi sebesar 13,39% dalam tahun 2017.

Pemilihan Model

Untuk mendapatkan model terbaik, dilakukan uji Chow dan uji Hausman sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Pada uji Chow ketika nilai prob F-stat > 0,05 maka *common effect* terpilih menjadi terbaik, namun ketika nilai prob F-stat < 0,05 maka *fixed effect* terpilih menjadi terbaik. Sesuai pada tabel diatas hasil pengujiannya yakni nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.0000 dengan tingkat signifikansi (α) 5% maka $0.0000 < 0.05$ berarti model terbaik pada uji chow adalah *fixed effect*, kemudian dilanjutkan dengan pengujian Hausman. Pada uji Hausman ketika nilai prob chi-square > 0,05 maka *random effect* terpilih menjadi terbaik, namun ketika nilai prob chi-square < 0,05 maka *fixed effect* terpilih menjadi terbaik. Sesuai pada tabel diatas hasil pengujiannya yakni nilai probabilitas chi-square sebesar 0.0008 dengan tingkat signifikansi (α) yang dipilih 5% maka $0.0008 < 0.05$ berarti model terbaik pada uji Hausman adalah *fixed effect*.

Tabel 3. Hasil Uji F(Chow) dan Uji Hausman

Uji Chow			
Effect	Test Statistik	d.f.	Prob
Cross-Section F	439.328013	(28,141)	0.0000
Cross-Section Chi Square	779.535321	14	0.0000
Uji Hausman			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-Section Random	19.009042	4	0.0008

Analisis Data Panel

Berdasarkan hasil olah data melalui e-views diperoleh hasil *fixed effect* model terbaik. Pada tabel diatas nilai F-statistik 977,3067 dengan probabilitas F sebesar 0.000000 lebih kecil dari 0,05 (5%) berarti variabel independent (PDRB, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent (tingkat kemiskinan). Selanjutnya hasil olah data tersebut mendapatkan pula nilai koefisien determinasi yakni 0.995512 atau terdapat 99,55% pengaruh perubahan dari empat variabel independent yakni PDRB, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap variabel dependent yakni tingkat kemiskinan. Sementara 0.45% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian yang tidak digunakan.

Tabel 4. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel	Coefficient	Std error	Statistic	Prob
PDRB	-9.21E-06	9.41E-06	-0.078692	0.3294
IPM	-0.138802	0.048253	-2.876528	0.0046
JUMLAH_PENDUDUK	-5.68E-06	1.64E-06	-3.452287	0.0007
TPT	-0.035049	0.042562	-0.823485	0.4116
C	37.62455	2.740792	13.72762	0.0000
F-Statistic	977.3076		Prob.F	0.000000

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Hal ini tercermin dari PDRB yang tidak inklusif. Sebagian besar PDRB Papua berasal dari sektor tambang yang cenderung bersifat kapital-intensif dan tidak menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk lokal. Jika manfaat ekonomi dari sektor unggulan tidak terdistribusi dengan baik ke masyarakat miskin atau tidak diiringi dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka pertumbuhan PDRB tidak berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa PDB memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Damanik & Sidauruk, 2020). Temuan ini menggarisbawahi sifat kompleks kemiskinan dan perlunya strategi komprehensif untuk mengatasinya.

IPM menunjukkan hubungan negatif terhadap kemiskinan, hal ini sejalan dengan beberapa kajian yang dilakukan di Indonesia. Tingkat IPM yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Temuan (Riyanto, 2021) menunjukkan bahwa IPM menjelaskan 42,8% varians kemiskinan. Studi yang lain mengidentifikasi bahwa IPM merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (Rodliyah, 2023). Dampak IPM terhadap kemiskinan bersifat langsung dan tidak langsung, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai faktor mediasi (Jamaliah & Elyta, 2022; Avigna et al., 2022). Pendidikan, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau rata-rata lama sekolah, ditemukan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam beberapa kasus (Balqis et al., 2023; Putri & Prasetyanto, 2021). Sementara penelitian lain tidak menemukan dampak signifikan (Hasibuan, 2023).

Jumlah populasi penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Penduduk yang lebih banyak dapat menyediakan tenaga kerja bagi sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata lokal, yang memiliki potensi besar di Papua. Dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih baik, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yang berkontribusi pada penurunan tingkat

kemiskinan. Beberapa penelitian lain menemukan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (Mardiyana, 2020; Loka, 2022) sementara yang lain melaporkan dampak negatif (Purnomo et al., 2023; Al Faruq & Yuliana, 2023). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten /Kota di Provinsi Papua. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang tersedia tidak memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (pekerjaan rentan atau informal). Selain itu rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan akses infrastruktur, dan distribusi ekonomi yang tidak merata dapat menghambat manfaat dari penurunan pengangguran. Bahkan jika tingkat pengangguran menurun, jika pendapatan dari pekerjaan yang tersedia rendah atau tidak stabil, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas. Beberapa penelitian lain juga tidak menemukan dampak signifikan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan (Balqis et al., 2023, Putri & Prasetyanto, 2021). Namun, satu penelitian melaporkan dampak negatif dan signifikan pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi, yang sering dikaitkan dengan kemiskinan (Hamid, 2022).

Kesimpulan dan Implikasi

Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk dan IPM berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Jumlah penduduk yang besar menciptakan permintaan dan tenaga kerja, sehingga akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat yang akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Adapun IPM mencerminkan peningkatan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ketika IPM meningkat, masyarakat lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi, sehingga tingkat kemiskinan berkurang secara signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PDRB dan tingkat pengangguran tidak berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Sebagian besar PDRB Papua berasal dari sektor tambang yang cenderung bersifat kapital-intensif dan tidak menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk lokal. Jika manfaat ekonomi dari sektor unggulan tidak terdistribusi dengan baik ke masyarakat miskin atau tidak diiringi dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka pertumbuhan PDRB tidak berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan. Temuan ini menyoroti interaksi kompleks antara PDRB, IPM, populasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan, yang menekankan perlunya pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi teori terutama dalam pengembangan model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan terutama di wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Adapun kontribusi praktis dari studi ini adalah memberikan informasi penting bagi pembuat kebijakan daerah dan pelaku ekonomi dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Abduvaliev, M., & Bustillo, R. (2020). Impact of remittances on economic growth and poverty reduction amongst CIS countries. *Post-Communist Economies*, 32(4), 525–546.
- Al Faruq, M., & Yuliana, I. (2023). The effect of population growth on poverty through unemployment in East Java province in 2017-2021. *Journal of Social Research*, 2(6), 1900–1915.
- Avigna, I. K. M., Apriadi, A. M., & Princess, P. (2022). Analysis of the effect of hdi, grdp, and minimum wages on poverty in central java for the period of 2011-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 157–166.
- Ayoo, C. (2022). Poverty reduction strategies in developing countries. *Rural Development-Education, Sustainability, Multifunctionality*, 17–57.
- Balqis, M. F., Siregar, R., Marpaung, R. G., & Marpaung, J. (2023). The Effect of Number of Population, Average Expenditure, Unemployment, and Number of Poor People in North

- Sumatra Province with Path Analysis Method. *Journal of Mathematics Technology and Education*, 2(2), 126–133.
- Bourguignon, F. (2000). The pace of economic growth and poverty reduction. *Delta*.
- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 358–368.
- Hamid, A. (2022). The influence of economic growth and unemployment on community poverty in pangkajene and islands regency. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 12(1), 46–53.
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62.
- Hull, K. (2009). Understanding the relationship between economic growth, employment and poverty reduction. *Promoting Pro-Poor Growth: Employment*, 1(1), 69–94.
- Jamaliah, J., & Elyta, E. (2022). *The Effect of Human Development Index (HDI) on Poverty and Crime in West Kalimantan, Indonesia. Khazanah Sosial*, 4 (1), 119–130.
- Loka, R. D. P. (2022). The Effect Unemployment, Education and the Number of Population on the Poverty Level in Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 317.
- Mardiyana, L. (2020). *The effect of population and education on poverty in East Java 2013-2017*. 485(1), 012126.
- Nguyen, H. T. T., Nguyen, C. V., & Nguyen, C. V. (2020). The effect of economic growth and urbanization on poverty reduction in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 229–239.
- Purnomo, D., Pohan, G. A., & Izza, S. N. (2023). The Effect of Unemployment Rate, Education Level and Total Population on Poverty in West Java Province. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(5), 377–390.
- Putri, N. A., & Prasetyanto, P. K. (2021). Determinants of Poverty in Java Island 2015-2020: Unemployment, HDI, Education or Economics Growth. *Organization*, 5(3), 51–61.
- Riyanto, A. (2021). Is The Human Development Index Effects The Poverty Rate in Indonesia 2020? *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 13(4).
- Rodliyah, D. (2023). *The Effect of HDI, Unemployment, and Investment on GRDP and Poverty. Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 6 (2), 199-209.
- Singh, R. (2012). Human development index and poverty linkages. *International Journals of Marketing and Technology*, 2(5), 219–230.
- Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty and economic growth: A review. *Technological and Economic Development of Economy*, 22(1), 156–175.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.
- Wan, G., Hu, X., & Liu, W. (2021). China's poverty reduction miracle and relative poverty: Focusing on the roles of growth and inequality. *China Economic Review*, 68, 101643.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Zaman, U., Onwe, J. C., Jena, P. K., Anyanwu, O. C., Ebeh, J. E., & Fulu, O. (2023). Unraveling the intricate relationship between unemployment, population, and poverty in Sub-Saharan Africa: Does quality of life matter? *Sustainable Development*, 31(5), 3930–3945.